

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI
DI TELUK LAMPUNG**
(Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus
Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

FITRI WAHYUNI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI TELUK LAMPUNG

(Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)

Oleh

FITRI WAHYUNI

Kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung yang cukup luas menimbulkan beberapa permasalahan atau ketidak sesuaian ditinjau dari kondisi sosial-ekonomi nelayan disekitar wilayah reklamasi. Setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan ternyata memberi dampak pada nelayan sekitar menjadi kesulitan dalam mencari ikan dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga didapatkan rumusan masalah bagaimana dampak sosial-ekonomi yang dirasakan nelayan akibat kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung, khususnya di Kelurahan Sukaraja. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberi gambaran dan menganalisis dampak sosial ekonomi yang dirasakan nelayan sebagai dampak yang timbul dari kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan reklamasi pantai. Dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dampak atau evaluasi sumatif dengan metode evaluasi milik Rossi and Freeman, kemudian menggunakan Undang-Undang dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan reklamasi pantai belum menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. (1) Masalah publik terkait kurangnya lahan di Kota Bandar Lampung belum dapat diselesaikan, (2) Tidak adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pesisir, (3) Cara pengimplementasian yang tidak tepat, (4) Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, (5) Belum adanya penanganan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dampak yang diterima masyarakat pesisir, (6) Timbulnya *mindset* masyarakat pesisir yang merasa dirugikan dan hanya menguntungkan pihak pengembang. Selain itu, kebijakan reklamasi pantai menghasilkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan di Kelurahan Sukaraja. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan, pengawasan dan koordinasi untuk menangani dampak serta mengikut sertakan masyarakat dalam proses kebijakan reklamasi pantai.

Kata Kunci : Kebijakan, Evaluasi, Reklamasi Pantai, Dampak.

ABSTRACT

IMPACT EVALUATION OF THE POLICY COASTAL RECLAMATION IN TELUK LAMPUNG

(Study Of Socio-Economic Impacts Of Fishermen On Kelurahan Sukaraja in Case
Of Coastal Reclamation on Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras,
The City Of Bandar Lampung)

By

FITRI WAHYUNI

The policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung ample poses some problems or lack of socio-economic conditions of rendering of fishermen around the area of reclamation. After the policy of coastal reclamation implemented, have are gave an impact on the fishermen about being the difficulty in finding fish and meet his needs. So the formula obtained by the issue of how socio-economic impacts of fishing due to the perceived policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung, especially Kelurahan Sukaraja. The purpose of this research is to give an overview of the impact of the social economy is perceived as one of the fishermen the impact arising from the existence of a policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung. This research was conducted to evaluate the impact of coastal reclamation policy. In evaluating the impact of this policy, researchers used the theory of impact evaluations or evaluation summative evaluation methods belonged to Rossi and Freeman, then use the law and some other supporting theory. Type of this research is descriptive research with qualitative approach.

Conclusion of this research is the policy of coastal reclamation have yet to produce the desired impact. This is due to several factors. (1) Problems related to lack of public land in the town of Bandar Lampung has yet to be resolved, (2) the lack of participation or the participation of coastal communities, (3) how implementation is not appropriate, (4) the Government of the city of Bandar Lampung that have yet to implement environmentally development, (5) Yet the existence of the handling of the Government of the city of Bandar Lampung accepted impact-related coastal communities, (6) the incidence of coastal communities must feel aggrieved and only benefit the developer. In addition, the policy of reclaiming the beaches generate unwanted impacts for coastal communities in particular Kelurahan Sukaraja fisherman. So the Government of the city of Bandar Lampung need to apply environmentally development, oversight and coordination to deal with the impact of requiring community as well as in the process of coastal reclamation policy.

Keywords: Policy, Evaluation, Coastal Reclamation, Impact.

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI
DI TELUK LAMPUNG**
(Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus
Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung)

Oleh

FITRI WAHYUNI

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurursan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

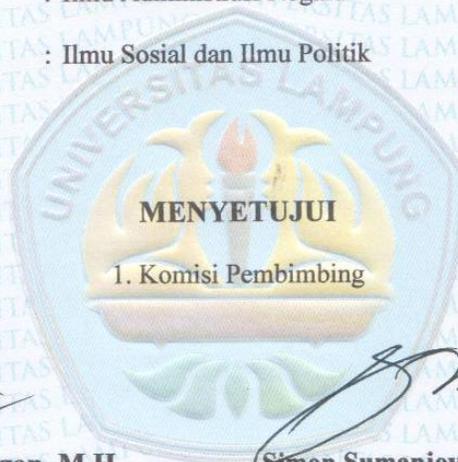
Judul Skripsi : **EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI TELUK LAMPUNG (Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja pada Kasus Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Fitri Wahyuni**

No. Pokok Mahasiswa : 1346041007

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

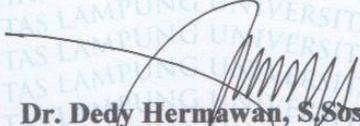
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP 19690815 199703 2 001


Simon Sumanjaya H., S.A.N., M.P.A.
NIP 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

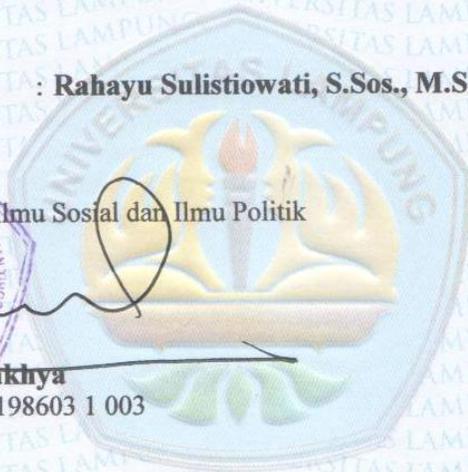
Ketua : Dra. Dian Kagungan, M.H.

Sekretaris : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.

Penguji Utama : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 17 Febuari 2017

Yang membuat pernyataan,



Fitri Wahyuni
NPM. 1346041007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fitri Wahyuni, lahir di Pulung Kencana, pada tanggal 29 November 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Aflahal Muhni dan Ibu Hj. Artati.

Penulis mengarungi seluruh waktu dan perjalanan keilmuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan di Kota Bandar Lampung. Penulis telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian Penulis melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 04 Tulang Bawang Tengah yang lulus tahun 2010. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 02 Tulang Bawang Tengah yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 juga penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2016 dipertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari.

MOTTO

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi”

*Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu
adalah untuk dirinya sendiri*

(Q.S. Al-Ankabut 29:6)

Pantang pulang, sebelum menang

(Fitri Wahyuni)

*Jangan menjadi berlian yang kilapnya selalu terumbar
didepan mata, tapi jadilah berlian yang kilapnya
menyinari banyak orang dan tak perlu terumbar oleh
mata.*

(Fitri wahyuni)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT

*Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, ku
panjatkan rasa syukur atas semua karunia yang telah
Allah berikan kepadaku.*

Kupersembahkan Karya ini kepada:

*Babeku tercinta dan Umiku tersayang, kedua uniku dan
satu-satunya adikku tersayang. Terima kasih yang tulus
ku ucapkan atas segala ketulusan hati, kasih sayang
yang tiada henti, perhatian, motivasi dan doa yang
selalu tercurahkan kepadaku, untuk kesuksesanku.*

*Seluruh keluarga besarku, sahabat seperjuangan dan
semua sahabat kecilku yang telah mendoakan dan
mendukung setiap langkah kesuksesanku.*

*Para pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu
ku kenang, ku hargai dan selalu ku hormati disepanjang
umurku.*

Alamamater Tercinta

SANWACANA

Alahamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung (Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Hi. Aflahal Muhni dan Hj. Artati yang telah menjadi orang tua terhebat sepanjang masa, penulis sangat bersyukur telah terlahir dan di besarkan oleh orang tua seperti Umi dan Babe. Terimakasih telah membesarkan dan memberi kasih sayang tulus, doa, semangat, yang selalu diberikan kepada penulis,

Terimakasih kepada Babe tersayang yang selalu mendoakan putri kecilnya, selalu mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tidak pernah telah mendengarkan keluh kesah putri kecilnya ini dan tidak pernah lelah mengantar jemput putri kecilnya ini dan terimakasih telah menjadi sosok imam dan tauladan untuk anak-anaknya. Untuk umi tercinta, terimakasih selalu sabar menghadapi tingkah putri kecilnya ini, selalu menuruti keinginan anaknya, tiada henti mendoakan putri kecilnya ini, dan selalu menjadi teman curhat dan tempat menuangkan keluh kesahan putri kecilnya ini. Terima kasih tiada henti dan tulus dari lubuk hati putri kecilmu ini atas segalanya yang tak terbalaskan ini, mungkin hanya doa yang dapat putri kecilmu ini berikan kepada dua orang tua terhebat ini yang dapat diberikan. *I love You*, Umi Babe

2. Kedua Uni ku, dr. Kiki Septiafni, dr. Alfiza Nismala Sari dan Kakak Iparku dr. Riza Andrian Al Futuha, serta saudara sepupuku Arnis Yuwita, S.Pd, terimakasih telah memberikan dukungan, nasehat, semangat, doa dan arahan, motivasi serta contoh yang baik untuk Penulis. Dan tidak lupa, terima kasih kepada adik satu-satunya yang tercinta Reyhan Izza Arafah yang telah mengajari banyak hal tentang kesabaran, pengorbanan, dan cara menjadi Uni yang terbaik untuk adiknya, walaupun selalu merepotkan dan membuat kesal namun tetap terima kasih untuk selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
3. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran, motivasi serta semangat tiada hentinya. Terima Kasih Penulis ucapkan kepada ibu, yang telah memberikan pelajaran yang berharga kepada Penulis untuk dapat menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi segala rintangan, sabar, memberikan semangat tiada hentinya selama ini sampai pada tahap penyelesaian skripsi. Tanpa bimbingan ibu, penulis tidak akan sampai pada tahap ini dan jasa ibu selama ini, tidak akan terbalaskan.
7. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA selaku pembimbing kedua, yang selama ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, semangat dan motivasi yang sangat berharga. Terima kasih Penulis ucapkan kepada bapak atas segala pelajaran berharga yang telah diberikan agar penulis bisa menjadi pribadi yang lebih sukses dan pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan selama penelitian sampai dengan tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih Ibu telah memberikan banyak arahan, kritikan, nasihat, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat dan juga telah banyak membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik, juga berkat bantuan dan arahan dari Ibu.

9. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terima kasih ibu telah meluangkan waktunya, dan menjadi PA yang sangat perhatian kepada tiap mahasiswa dan mahasiswinya.
10. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang berharga yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu yang sudah didapat menjadi bekal yang berharga dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
11. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap informan penelitian: Bapak Hendra, Bapak Dirmansyah, Bapak Chepi, Bapak Barmawi dan Ibu Nuryanti, terkhusus kepada bapak Galih yang telah banyak membantu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas izin, data referensi, informasi, kerjasama, motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta Pihak kelurahan Sukaraja dan para Nelayan serta warga Kelurahan Sukaraja, terkhusus bapak Maryudi selaku Ketua Nelayan Sukaraja. Terima Kasih bapak atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turlab, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat dari SDN 01 Pulung Kencana: Mbak nana, Endha, Endang, Merdani, Boy Fernando, Walfin, terimakasih telah menjadi sahabat penulis dari sejak Taman Kanak-Kanak, SD, sampai dengan kita sama-sama kuliah. Tetap jadi sahabat terbaik *ya sobat* kecilku, semoga persahabatan kita terus terjaga sampai kita sama-sama menua.

14. Sahabat dari SMPN 04 TBT: Eka, Apri, Desi (*si lola*'), Ika, nana, septi.
Terima kasih atas waktu, cerita, candatawa, dukungan, semangat serta doanya kepada penulis. Semoga persahabatan kita selalu terjalin sampai tua nanti meskipun jarak seringkali menjadi penghambat dalam bertemu.
15. Sahabat dari SMA, Siti Qotimah ima, Udil (Bu bidan), Dwi, Marita, yang menjadi sabahat guyonan, ngerumpi dan sahabat yang peduli disaat susah dan senang. Terimakasih telah menjadi pelepas penat, canda gurau kalian selalu membuat hari menjadi terasa lebih sejuk, keakraban yang sejak dulu semoga terus terjaga sampai kita tua nanti.
16. Sahabat Terspesial, cantik-cantiku gadis *super*. Rahma Diani, panggilannya mak, terima kasih mak sayang sudah banyak mendukung penulis dalam meyelesikan skripsi, menemani turlab, sabahat yang nemenin *nganter-nganter* surat riset, sahabat perjuangan skripsi, sabahat makan bareng, sahabat kemana-mana bareng, sahabat minep bareng, terimakasih sekali lagi mak sayang untuk semua kenangan indah dan perjuangan kita bersama selama perkuliahan dan *skripsian*. Lela Septiani, terima kasih ebeb elak, yang sudah menjadi penyemangat, pendukung, sahabat curhat, sahabat makan bareng, sahabat minep bareng, temen turlab, terus jadi wanita yang tegar dan kuat *ya ebeb*. Nisa Aristya, panggilannya nca, terima kasih sudah menjadi sahabat yang terdewasa, doa, saran, semangat dan terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik mulai dari perkuliahan sampai *skripsian*. Meylani Hutagalung, panggilannya Mey, terimakasih mey sayang sudah banyak mendukung penulis, memberika doa, semangat, dukungan, dan perhatiannya. Terima kasih yang sangat tulus untuk cantik-cantiku, yang telah banyak mendukung,

mendoakan, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita terus terjalin sampai kita tua nanti, tetap jadi orang yang tulus menerima semua kekurangan dan kelebihan penulis, semoga kita semua jadi orang-orang yang sukses di dunia dan diakhirat *ya sayang-sayangku*. Terima kasih sekali lagi *kesayangan, love you full*.

17. Jaya Jadea, S.H (*on going*) calon Pak Hakim/ Jaksa, sahabat seperjuangan dari SMA sampai Kuliah di Universitas yang sama, orang yang sangat perhatian, dan tulus. Terima kasih atas segala pengorbanan, waktu, motivasi, dukungan, saran, doa, dan semua perhatiannya selama ini, dan mendukung penulis dalam mencari data-data yang mendukung penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang amat tulus untuk semua kenangan indah bersama yang sudah terlewat selama ini, bantuan dan segala kebaikannya, semoga kelak kita bisa terus bersama dan menjadi sukses dunia akhirat bersama. Jangan pernah sombong kalau kita sudah sama-sama sukses dan jangan pernah berubah, tetap jadi orang yang paling tulus dan sabar.

18. Sahabat ALASMENARA, Arinta si Rajin, Tukang Jarkom, dan baik hati. Terimakasih telah banyak menolong selama perkuliahan dan banyak memberikan arahan dan Jarkoman. Ayuwe si baik hati, Terima Kasih yuwe sudah banyak memberikan motivasi, memberi wawasan dan ilmu-ilmu baru. Adi si Baik hati yang selalu mendukung penulis, penyemangat, orang yang sangat tulus, perhatian, dan suka menolong, dan mandiri. Terima kasih sudah menjadi penyemangat dan sahabat yang selalu perhatian dan mendukung penulis dalam mencari referensi yang membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Pindo, sahabat Sekabupaten, terimakasih sudah

membantu selama perkuliahan dan menjadi sahabat baik yang memotivasi dan sangat dewasa. Galih si tukang begal, yang baik hati, terima kasih sudah menjadi sahabat yang memberika doa dan semangat kepada penulis. Dwi si wanita kuat dan menginspirasi untuk segera berhijrah, wanita yang berusaha memperbaiki diri dan bangkit dari penyakitnya, terima kasih telah menjadi sahabat yang menginspirasi penulis untuk terus bersyukur dan membantu penulis dalam mempelajari arti keiklasan.

19. Teman-Teman Seperjuangan ALAS MENARA (Ane 13): Asti, Nanda, Maya, Meilika, Jita, Dewi, Dhimas, Dinda, Ari, Fajar, Sidik, Okta, Uun, Uki, Ghina, Septiya, Okke, Iqbal, Ghozie, Yoga, Yogi, Kiana, Edo, Elva, Nita, Wulan, Tulva, Kartika Reyhana, Kartika Febri, Ala, Destiana, Desti, Pepah, Rindu, Andan, Hafis, Sedi, Respaty, Revardo, Taufik, Tiara, Riska, Fella, Ratu, Cici, Fitria, Dila, Sasa, Devi permata, Devi, Defita, Arif, Peppy, Wahyu, Agnes, Anggi, Arta, Kessy, Eci, Dewi, Nuris, Eka, Elyza, Isti, Hendri, Hendriko, Hendro, Laras, Oca, Resghi, Sintia, Vania, Hasbi (Bibi), Ayu Krui, Wiza, Zikri, Zulham. Terima kasih sudah menjadi bagian yang penting dalam masa perkuliahan dan memberikan dukungan serta telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Para pembahas mahasiswa dan moderatorku dari proposal sampai hasil (Rahma, Bang Yogi, Bang Rifki dan Mbak Serli). Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kritikan, saran yang kalian berikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

21. Dan terspesial untuk Alifia, sahabat sekamar terbaik, terdekat, terakrab, tersabar, Terima Kasih untuk semua perjuangan kita bersama melewati 60

hari di tempat KKN yang sangat jauh itu, dan kita lewati bersama dengan canda tawa, air mata, dan perjuangan untuk menempuh jauhnya jalan yang becek dan terjang, Terima Kasih Mak untuk semua nasehat, motivasi, dukungan dan doa selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan masa KKN dan Skripsi ini.

22. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung.

23. Semua Pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya penulis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, 27 Januari 2017
Penulis

Fitri Wahyuni
NPM.1346041007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan terhadap Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	16
B. Tinjauan terhadap Evaluasi Kebijakan	20
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	20
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan	22
3. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik	23
C. Tinjauan terhadap Evaluasi Dampak Kebijakan	24
1. Arti Dampak.....	24
2. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik	25
3. Tujuan Evaluasi Dampak	27
4. Dimensi Dampak	27
5. Metode Evaluasi Dampak	29
D. Tinjauan terhadap Reklamasi Pantai.....	30
1. Pengertian Reklamasi Pantai.....	30
2. Tujuan Reklamasi	33
3. Syarat-Syarat Pengadaan Reklamasi Pantai.....	34
4. Dampak Reklamasi	35
E. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	44
B. Fokus Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan data.....	49

F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Teknik Keabsahan Data	53

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	56
B. Perubahan Jumlah Kecamatan	57
C. Gambaran Umum Kecamatan Bumi Waras.....	58
D. Lokasi Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras	59
E. Lokasi Nelayan Kelurahan Sukaraja.....	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	66
1. Pelaksanaan Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung.....	67
a. Kondisi Pra dan Pasca Intervensi Kebijakan Reklamasi	67
b. Keberhasilan/ Kegagalan Kebijakan Reklamasi Pantai.....	74
c. Tujuan atau Sasaran dari Kebijakan Reklamasi Pantai	80
2. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai terhadap kondisi Sosial Ekonomi Nelayan.....	86
a. Perubahan Kondisi Perekonomian Nelayan	86
b. Perubahan Kondisi Pendidikan anak-anak Nelayan	95
c. Perubahan Kondisi Kesehatan	99
B. Pembahasan.....	103
1. Pelaksanaan Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung.....	103
a. Kondisi Pra dan Pasca Intervensi Kebijakan Reklamasi	103
b. Keberhasilan atau kegagalan Kebijakan Reklamasi Pantai	106
c. Tujuan atau sasaran Reklamasi Pantai dari Kebijakan Reklamasi Pantai.....	108
2. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai terhadap kondisi Sosial Ekonomi Nelayan.....	111
a. Perubahan Kondisi Ekonomi Nelayan	111
b. Perubahan Kondisi Pendidikan Anak Nelayan	116
c. Perubahan Kondisi Kesehatan	118

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	123
1. Pelaksanaan Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung.....	123
2. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar izin reklamasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2003 s/d 2016	6
2. Data Informan	50
3. Luas Bentangan Wilayah Kelurahan Sukaraja.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	42
2. Lokasi Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras	60
3. Bagan struktur kelompok nelayan Kelurahan Sukaraja Tahun 2014.....	64
4. Keadaan Pesisir Pantai di Kelurahan Sukaraja tempat nelayan menyandarkan perahu	68
5. Sampah-sampah yang ada dipinggiran Teluk Lampung.....	71
6. Peta Rencana <i>Water Front City (WFC)</i>	79
7. Penangkapan ikan oleh nelayan Sukaraja	88
8. Hasil tangkapan ikan nelayan Sukaraja	91
9. Dokumen Daftar Penduduk Sukaraja Menurut Mata Pencarian.....	94
10. Dokumen Daftar Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan karena sebagian besar wilayah Lampung dikelilingi laut yaitu, laut Jawa dan Selat Sunda hingga Samudera Hindia, hal ini membuat Lampung sebagai salah satu jalur komunikasi lintas laut strategis. Dalam Dokumen Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, tahun 2000, menjelaskan secara keseluruhan daerah Lampung memiliki luas daratan 35.376,5 km², panjang garis pantai Lampung 1.105 km (termasuk 69 pulau kecil) dengan dua teluk besar yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka, serta 184 desa pantai dengan luas total 414.000 ha. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, daerah Lampung memiliki luas wilayah perairan pesisir lebih kurang 16.625,3 km² sehingga secara keseluruhan Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8km².

Dengan kondisi seperti ini, tentunya Lampung memiliki potensi alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber penghasilan dan daya tarik tersendiri. Tidak dapat dipungkiri, dengan letak Provinsi Lampung yang strategis ini mengandung keuntungan dan juga

kerawanan dalam mendominasi pembangunan, khususnya di Kota Bandar Lampung. Dibalik potensi alam yang melimpah dan menawan di Kota Bandar Lampung terdapat kekhasan morfologi tersendiri baik itu pegunungan, perbukitan, daratan hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung yang sangat potensial dan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, para investor dan perusahaan swasta yang ingin mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki Lampung.

Pantai yang membentang luas dengan kekayaan laut yang melimpah dan para nelayan yang ikut menikmati melimpahnya hasil ikan, tidak hanya itu perbukitan dengan tanaman dan pepohonan yang hijau juga menjadi daya tarik tersendiri, ditengah penatnya dan banyaknya polusi udara diperkotaan, tentunya selain keindahan juga berfungsi sebagai paru-paru kota dan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Namun pada kenyataannya, semua pesona alam yang ada di Lampung terutama Kota Bandar Lampung, kondisinya saat ini memprihatinkan karena tergerus oleh pertumbuhan kota dan aktivitas perekonomian. Ini dibuktikan dengan cukup banyak bukit atau gunung yang dibuat perhotelan, perumahan dan bahkan diruntuhkan untuk mengambil tanahnya dan ditimbunkan ke daerah pesisir atau laut.

Demi pengembangan kota dan aktivitas perekonomian, sering kali mengabaikan dan mengesampingkan segala dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak lingkungan, ekonomi maupun sosial. Pemerintah yang hanya terfokus pada pertumbuhan dan pengembangan kota tanpa menganalisis dampak yang ditimbulkan, seringkali mengeluarkan kebijakan yang diduga merugikan bagi

masyarakat, dan cenderung menguntungkan bagi sebagian pihak saja. Bahkan saat ini demi pengembangan kota, banyak pantai di Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan Reklamasi pantai oleh pihak swasta (atas izin atau kebijaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung).

Sebenarnya aturan mengenai reklamasi telah ada dan dilegalkan, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 34 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan bahwa reklamasi memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau *drainase*. Selain itu reklamasi pantai hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan ekonominya.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa dalam pengambilan sumber material reklamasi tidak boleh merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakibatkan terjadinya erosi pantai dan mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya proyek reklamasi ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan

cenderung tidak memperhatikan kondisi dan dampak yang tidak diharapkan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Hasni (2010:352), mengatakan bahwa reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. Masih menurut Hasni (2010:357), mengatakan bahwa kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti bagi wilayah dan Negara. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai.

Maka dari itu pemerintah mulai melegalkan adanya reklamasi didaerah-daerah yang dianggap dapat strategis untuk dilakukannya reklamasi pantai. Begitu pula dengan pemerintah Kota Bandar Lampung yang mulai memperbolehkan sejumlah perusahaan untuk melakukan reklamasi disepanjang Teluk Lampung. Awal munculnya ide untuk mengadakan reklamasi pantai di Teluk Lampung tersebut berasal dari mantan Walikota Kota Bandar Lampung yaitu bapak Eddy Sutrisno tahun 2003 dan beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bandar

Lampung, dengan menerbitkan izin reklamasi di Teluk Lampung kepada beberapa perusahaan, yang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung perihal izin reklamasi pantai di beberapa lokasi di Bandar Lampung, seperti di Gunung Kuyit, Kelurahan Bumi Waras, Srengsem, Sukaraja, Way Lunik dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, reklamasi pantai sepanjang perairan Kota Bandar Lampung mendapat penolakan dari masyarakat pesisir karena dianggap telah menyebabkan ekosistem tercemar dan bukit sekitar ikut tergerus, sebagai akibat dari penimbunan pantai yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dan nelayan sekitar lah yang akan banyak merasakan dampak dari adanya reklamasi pantai tersebut. Sebagian warga di Bandar Lampung 20 persen adalah nelayan, jangan sampai reklamasi merugikan mereka (Sumber: <http://m.republika.c.id/berita/nasional/daerah/16/04/24/o65a2t280-walhi-tolakreklamasi-teluk-lampung>, diakses pada tanggal 28 Mei 2016).

Faktanya bahwa saat ini dampak dari reklamasi ini mulai dirasakan oleh para nelayan yang mengaku pendapatan mereka dari menangkap ikan menjadi menurun akibat tercemarnya pantai, pantai menjadi kotor dengan sampah, menyebabkan banjir dan masyarakat juga mengeluhkan jalan-jalan sekitar pantai yang rusak akibat aktivitas truk-truk besar yang memuat material timbunan, tentunya semua itu akan merugikan masyarakat sekitar pesisir yang akan langsung merasakan dampak yang ditimbulkan dari proyek reklamasi pantai yang dikerjakan oleh perusahaan. (Sumber: <http://lampost.co/berita/cemar-di-teluk-lampung>, diakses tanggal 28 Mei 2016).

Diantara perusahaan yang menimbun/reklamasi pantai adalah PT. Teluk Wisata Lampung (TWL), PT. Sekar Kenaka Langeng (SKL), PT. Bukit Alam Surya (BAS), PT. Kurnia Agro Industri, PT. Bangun Lampung Semesta (BLS), PT. Noahtu Shipyard dan lain-lain.

Tabel 1. Daftar izin reklamasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2003 s/d 2016

No.	Pemohon	Lokasi Pembangunan	Luas Lahan	Tahun	Status
1	PT. Sekar Kanaka Langeng	Kelurahan Way lunik, Kecamatan Panjang	20 hektar	2003	Belum selesai dan belum diperpanjang
2	PT. Bukit Alam Surya	Kelurahan Way Kuala, Kecamatan Bumi Waras	3 hektar	2003	Sudah selesai
3	PT. Bukit Asam	Kelurahan Srengsem dan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang	80,7 hektar	2009	Sudah selesai
4	PT. Hanjung Indonesia	Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang	3 hektar	2010	Sudah selesai
5	PT. Teluk Wisata Lampung	Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras	117 hektar	2010	Belum selesai dan izin diperpanjang di tahun 2015
6	PT. Kurnia Agro Industri	Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang	20 hektar	2010	Belum selesai
7	PT. Noahtu Shipyard	Jln. Alamsyah, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang	1,7 hektar	2014	Sudah selesai
8	PT. Teluk Wisata Lampung	Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur	5 hektar	2015	Izin dicabut
9	PT Teluk Wisata Lampung	Gunung Kunyit, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras	50 hektar	2015	Izin Perpanjangan ditahun 2010
10	PT. Bangun Lampung Semesta	Jl. Yos Soedarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Bumi Waras	8 hektar	2015	sudah selesai 6,6 hektar dan kemudian izin operasional dihentikan
11	Ronny Lihawa	Jln. Yos Soedarso, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Bumi Waras	1,3 hektar	2016	Izin dicabut

Sumber: *BAPPEDA Kota Bandar Lampung, 2016*

Berdasarkan tabel 1. Diketahui bahwa PT. Teluk Wisata Lampung mendapatkan izin reklamasi pantai di Kelurahan Bumi Waras, yang cukup luas ditahun 2010 seluas 117 hektar dan izin diperpanjang di tahun 2015 menjadi 50 hektar dan di Kelurahan Kota Karang seluas 5 hektar namun statusnya telah dicabut. Perusahaan lain yang mendapat izin reklamasi pantai yaitu PT. Kurnia Agro Industri dan PT. Sekar Kanaka Langgeng, yang masing-masing mendapat izin reklamasi seluas 20 hektar di Kelurahan Srengsem dan Way lunik. Dan perusahaan lainnya seperti PT. Bukit Asam mendapat 80,7 hektar namun telah selesai, selain itu untuk PT. Noahtu Shipyard, PT. Bukit Alam Surya, PT. Bangun Lampung Semesta, dan PT. Hanjung, hanya mendapat izin reklamasi pantai kurang dari 9 hektar di masing-masing lokasi yang berbeda. Selain beberapa perusahaan yang disebutkan diatas, adapula izin reklamasi yang diberikan kepada perseorangan yaitu kepada Ronny Lihawa di Kelurahan Way lunik seluas 1,3 hektar yang statusnya sudah dicabut.

Kemudian dalam hal pelaksanaan reklamasi pantai di Teluk Lampung, PT. Teluk Wisata Lampung sebagai perusahaan yang cukup besar mendapat izin reklamasi pantai dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lokasi pelaksanaan reklamasi ini terletak di Kelurahan Bumi Waras seluas 117 hektar. Izin reklamasi PT. Teluk Wisata Lampung didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor. 002. Tahun 2010/012/TWL/PKS/06/2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP. 642 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Pekerjaan Reklamasi Pantai. Tidak hanya itu, bahkan izin reklamasi PT. Teluk Wisata Lampung telah di terbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 790/I. 01/HK/2015 tertanggal 14 Juli 2015 perihal izin

reklamasi di Bumi Waras, kepada PT. Teluk Wisata Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 799/III. 24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit, kepada PT Teluk Wisata Lampung (Sumber: <http://rmol.co/read/2016/07/20/253751/Kejagung-Kirim-Tim-Usut-Reklamasi-Teluk-Lampung>, diakses tanggal 10 agustus 2016).

Kelurahan Bumi Waras menjadi salah satu pilihan lokasi reklamasi pantai yang cukup luas, mengingat di daerah tersebut cukup strategis karena banyak terdapat kawasan pertokoan, pergudangan dan industri. Selain itu PT. Teluk Wisata Lampung juga memilih Kelurahan Bumi Waras dan Gunung Kunyit sebagai tempat reklamasi karena disekitar proyek reklamasi tidak terdapat banyak pemukiman warga yang tinggal disekitarnya. Namun dalam hal ini Kelurahan Sukaraja merupakan kelurahan terdekat, dan berbatasan langsung dengan proyek reklamasi di Kelurahan Bumi Waras dengan PT. Teluk Wisata Lampung sebagai pelaksananya. Sedangkan di Kelurahan Sukaraja juga cukup padat kawasan pemukiman warga yang tentunya dampak pelaksanaan reklamasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sukaraja. Dan di sekitar proyek reklamasi tersebut, masyarakat Kelurahan Sukaraja khususnya yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan dampak dari reklamasi pantai, dalam hal ini masyarakat yang ada di Kelurahan Sukaraja mayoritas berprofesi sebagai nelayan jika dibandingkan dengan Kelurahan Bumi Waras yang hanya sedikit sekali yang berprofesi sebagai nelayan.

Masyarakat Kelurahan Sukaraja menilai perusahaan cenderung mengabaikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan reklamasi tersebut, hal senada pun diungkapkan oleh bapak Zainal ketua RT 11 lingkungan I, Kelurahan Sukaraja, “adanya reklamasi ini membuat kondisi air menjadi keruh warnanya sampai hitam kecoklatan akibat tanah timbunan bercampur dengan air laut dan semakin banyak sampah, yang berdampak pula pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan sekitar. Para nelayan yang ada di daerah Sukaraja saat ini banyak mengeluhkan dampak yang merugikan bagi nelayan dari adanya reklamasi tersebut, akibatnya ikan-ikan sudah tidak ada lagi dipinggiran, dan para nelayan pun terpaksa harus membawa perahu hingga ketengah, hal ini tentu akan menambah ongkos produksi nelayan”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 agustus 2016).

Setelah adanya reklamasi ini, para nelayan sekitar yang bergantung hidupnya dari hasil laut, merasa dirugikan, baik secara materil maupun non materil. Nelayan sekitar menjadi mengeluhkan menurunnya hasil tangkap ikannya akibat tercemarnya laut, ini menyebabkan nelayan harus mencari lebih jauh lagi lautan yang belum tercemar untuk menangkap ikan. Seperti penuturan bapak Maryudi selaku ketua nelayan Sukaraja, “sekarang ini hasil tangkapan ikan, tidak seperti dulu lagi, kalau dulu beraneka ragam hasil tangkapan dan bisa mendapat 2 (dua) keranjang besar sekali melaut, sedangkan sekarang hanya dapat 2-3 ember kecil saja, makanya banyak nelayan yang memilih untuk beralih menjadi buruh tidak tetap”. (Hasil wawancara pada tanggal 11 agustus 2016). Saat ini hanya tersisa sekitar 81 rumah tangga yang menekuni profesi nelayan tetap di Sukaraja, sebagian lainnya memilih untuk mencari pekerjaan lainnya disaat sepi tangkapan

seperti saat ini, dan kembali menjadi nelayan saat tangkapan ikan mulai banyak kembali. Bahkan sebagian nelayan lainnya memilih untuk meninggalkan profesi nelayan dan beralih profesi sebagai buruh tidak tetap, tukang bangunan, kuli pasar, sopir dan lain-lain. Selain dampak ekonomi nelayan yang merasa pendapatannya menurun, tentunya ini juga akan berdampak pada aspek sosial.

Dari hasil Prariset awal ditemukan beberapa fenomena seperti hasil tangkapan mulai menurun akibat dari reklamasi pantai dan jauhnya wilayah tangkapan menyebabkan pendapatan nelayan menurun, diduga berpengaruh langsung terhadap biaya pendidikan anak-anaknya. Penghasilan yang minim membuat para nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja dan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya lagi, dan masih banyak lagi masalah yang timbul baik itu, dampak terhadap lingkungan, ekonomi-sosial masyarakat sekitar tempat pelaksanaan proyek reklamasi pantai di Teluk Lampung.

Tidak hanya dampak yang dirasakan nelayan, namun pada kenyataannya, reklamasi ini juga telah menyimpang dari peraturan yang ada, material yang digunakan untuk melakukan reklamasi dikeruk dari wilayah bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung salah satunya yaitu Bukit Kunyit. Selain menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut juga secara tidak langsung reklamasi juga merusak ekologi disekitar bukit yang dikeruk, sehingga dapat menimbulkan banjir dan kurangnya daerah resapan. (Sumber: <http://lampung.Tribunnews.com/2016/04/10/reklamasi-pantai-di-bandarlampung-berpotensi-rusak-terumbu-karang>, diakses tanggal 28 Mei 2016).

Selain beberapa kerugian (dampak negatif) yang dikeluhkan oleh masyarakat (nelayan), menurut Olivianty Rellua (2013) dalam (<http://ejournal.unsrat.ac.id/>) ternyata reklamasi pantai juga memberikan keuntungan (dampak positif) dalam mengembangkan wilayah dan pemanfaatan lahan yang dianggap kurang produktif, praktek ini juga memberikan pilihan penyediaan lahan dalam wilayah/kota, pengembangan wisata pantai, berkembangnya pusat kegiatan bisnis, pengaturan sistem transportasi yang terpadu, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir serta dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah dan masyarakat baik APBD, dan lapangan kerja baru. Memang beberapa keuntungan dari kebijakan reklamasi tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Melihat dari berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, dari adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung ini, maka perlunya penilaian atas dampak baik itu yang di harapkan maupun yang tidak diharapkan, yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Rossi dan Freeman dalam Parsons (2008:604), mengatakan bahwa penilaian atas dampak adalah memperkirakan intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Maka dari itu sangat penting untuk mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh nelayan sekitar proyek reklamasi tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa nelayan sekitar lah yang akan merasakan dampaknya secara langsung yang tentunya berimbas pula pada perubahan sosial-ekonomi nelayan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Evaluasi Dampak Kebijakan reklamasi Pantai Di Teluk Lampung (Studi dampak sosial-ekonomi nelayan Kelurahan Sukaraja pada kasus reklamasi pantai di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana dampak sosial-ekonomi yang dirasakan nelayan akibat adanya Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung, khususnya di Kelurahan Sukaraja?”

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah memberi gambaran dan menganalisis dampak sosial-ekonomi yang dirasakan nelayan sebagai salah satu dampak yang timbul dari adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis adalah sebagai masukan bagi pengembangan Konsep Ilmu Administrasi Negara yang mengkaji tentang Kebijakan Publik, khususnya pada penelitian ini mengenai dampak Kebijakan publik yang diambil Pemerintah

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi terkait atau bagi penggampu kebijakan (*stakeholder*) dan lembaga swadaya masyarakat untuk mampu memberikan alternatif dalam menentukan kebijakan yang meminimumkan dan memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dalam membuat dan menjalankan kebijakan pembangunan, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik biasanya dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan-kebijakan publik kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Budi Winarno mengutip pendapatnya Robert Eyestone (2012: 20) mengatakan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemetintah dengan lingkungannya”. Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Indiahono (2009: 17) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan publik dalam pengertian modern, yaitu:

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai eskpresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal spesifik
- d. Sebagai keputusan pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program

- g. Sebagai output
- h. Sebagai “hasil” (*outcome*)
- i. Sebagai sebuah proses.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), memberikan definisi kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Sementara itu kebijakan menurut Anderson dalam Waluyo (2007:42), mendefinisikan kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Dunn, 2003:132), “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

R.S. Parker dalam Wahab (2008: 51) juga telah berusaha menyajikan suatu daftar yang cukup lengkap mengenai berbagai definisi kebijakan publik. Salah satu definisi menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. Berdasarkan macam-macam definisi diatas maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, kebijakan publik adalah segala atau semua usaha atau tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:35-37) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang di pilih dan di angkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakn masing-masing

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas *legislative*, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah di ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih

dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di inginkan.

Penjelasan tentang tahap-tahap kebijakan publik diatas sebagai penjelasan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tahapan pertama adalah tahap penyusunan agenda disinilah masalah diidentifikasi dan dipilih apakah masalah tersebut layak untuk dibahas dalam tahapan formulasi kebijakan, setelah selesai pada tahap formulasi kebijakan pada tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi. Setelah alternatif kebijakan yang terbaik yang dipilih, selanjutnya kebijakan tersebut disahkan dan kemudian diimplementasikan untuk mencapai tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut. Setelah kebijakan diimplementasikan dengan batas waktu yang ditentukan selanjutnya kebijakan tersebut dievaluasi apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembuatan kebijakan atau belum.

Dalam penelitian ini mengambil tahap tentang evaluasi kebijakan publik. Karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang dampak kebijakan dari reklamasi pantai di Teluk Lampung.

B. Tinjauan terhadap Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Anderson dalam Winarno (2012: 229), mengemukakan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir dalam suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2008: 471) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Selanjutnya menurut Winarno (2012: 23) evaluasi kebijakan

dipandang sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata.

Dari beberapa pengertian diatas, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk menilai manfaat-manfaat atau dampak dari sebuah kebijakan publik yang telah diimplementasikan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Selain itu menurut AG. Subarsono dalam Syurahman Toha (2014:17), evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengukuran atau *output* dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Wibawa (1994:10) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik empat fungsi yaitu :

- a. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realita yang diamati. Evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

3. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Parsons (2008: 549-552) terdapat dua tipe dalam evaluasi, yakni:

1) Formative evaluation

Palumbo dalam Parsons (2008:549), mengemukakan bahwa evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman dalam Parson (2008:550), mendeskripsikan metode evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan, yaitu:

- a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
- b. Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak;
- c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program.

2) Summative Evaluation

Palumbo dalam Parson (2008:552) mendefinisikan evaluasi sumatif digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang ditangani. Evaluasi sumatif berusaha memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif dilakukan pascaimplementasi, dimana evaluasi dimaksudkan untuk untuk memperkirakan

dan membandingkan dampak dari intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain.

Dari uraian diatas, maka peneliti menggunakan tipe evaluasi yaitu evaluasi sumatif atau *summative evaluation*, yaitu mengukur bagaimana sebuah kebijakan reklamasi pantai memberikan dampak terhadap masalah yang ditangani. Evaluasi sumatif berusaha memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu.

C. Tinjauan terhadap Evaluasi Dampak Kebijakan

1. Arti Dampak

Menurut Soemarwoto (1994:54), mengatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. Akan tetapi di Negara maju banyak orang lebih atau hanya mempertahankan dampak negatif dari pada dampak positif, bahkan umumnya dampak positif diabaikan. Masih menurut Soemarwoto (1994:57), mengatakan bahwa banyak faktor mempengaruhi penentuan apakah dampak itu baik (*positif*) atau buruk (*negative*). Salah satu faktor penting dalam penentuan itu ialah apakah seseorang diuntungkan atau dirugikan oleh sebuah proyek pembangunan tertentu.

Irawan dalam Sari (2015:29), dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola

perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Dari beberapa pengertian diatas, dampak dapat diartikan sebagai perubahan atau efek yang dapat bersifat positif maupun negatif yang muncul dari sebuah akibat pelaksanaan aktivitas atau kegiatan.

2. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik

Penilaian terhadap kebijakan berbeda dengan dampak kebijakan publik. Menurut Islamy (1986:114), menyatakan bahwa hasil kebijaksanaan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan dampak kebijaksanaan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijaksanaan-kebijaksanaan tadi.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 226), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas yang pertama.

Setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal. Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Palumbo dalam Parson (2008:552) mendefinisikan evaluasi sumatif atau evaluasi dampak digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang ditangani. Sedangkan Menurut Rossi dan Freeman dalam Parson (2008:604) penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi—yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga memengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu. Adapun beberapa kriteria menurut Rossi dan Freeman, yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang di jadikan fokus analisis adalah sebagai berikut:

- a. peluang terjadinya dampak
- b. jumlah orang yang akan terkena dampak
- c. untung rugi yang di derita subyek dampak
- d. ketersediaan data untuk melakukan analisis
- e. relevansi terhadap kebijakan

f. perhatian publik terhadap dampak kebijakan tersebut

Dari beberapa pengertian diatas, evaluasi dampak kebijakan dapat diartikan sebagai akibat atau konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan kebijakan dengan mengukur seberapa jauh kebijakan tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan atau belum.

3. Tujuan Evaluasi Dampak

Dalam Rochyati dalam Sari (2015:31), evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yang diintervensi. Tujuan dari Evaluasi sumatif/dampak bertujuan untuk:

- a. Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
- b. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
- c. Mengeksplere apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
- d. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain.

4. Dimensi Dampak

Kebijakan sering kali dijadikan sebagai suatu keputusann yang harusnya mempertimbangkan banyak aspek didalamnya , karena itu kebijakan yang diambil Negara tentunya telah melewati fase pertimbangan yang cukup panjang. Penilaian kebijakan Negara banyak dilakukan untuk mengetahui dampak

kebijaksanaan Negara. Dan dampak kebijaksanaan itu mempunyai beberapa macam dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijaksanaan Negara.

Adapun menurut Anderson dalam Islamy (1986:115), dimensi dampak kebijaksanaan Negara itu adalah sebagai berikut:

- a. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijaksanaan itu terutama ditujukan pada siapa? Ini perlu ditentukan terlebih dahulu.
- b. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut "*externalities*" atau "*spillover effects*". Limbah kebijaksanaan ini bisa positif atau bisa pula negative.
- c. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- d. Dampak kebijaksanaan terhadap "biaya" langsung atau *direct costs*. Menghitung "biaya" setiap rupiah dari setiap program kebijaksanaan pemerintah (*economic costs*) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*).
- e. Dampak kebijaksanaan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagaimana disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantitatifkasikan (diukur).

5. Metode Evaluasi Dampak

Rossi dan Freeman dalam Parsons (2011:604), metode yang digunakan di dalam penilaian atas dampak, antara lain:

- a. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi;
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi;
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu;
- e. Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program;
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan;
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang dikemukakan oleh Rossi and Freeman dalam Parson (2008:604) beberapa metode yang digunakan dalam penilaian dampak, antara lain:

- a. Membandingkan problem atau situasi atau kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi. Peneliti membandingkan *problem* atau situasi atau kondisi

dengan apa yang terjadi sebelum dilaksanakan dan setelah dilaksanakannya Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung.

- b. Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program. Peneliti ingin mengevaluasi apakah Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung berhasil atau gagal dilaksanakan melihat dari manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang didapatkan dari pelaksanaan reklamasi pantai
- c. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak sebenarnya terjadi, apakah sesuai dengan dampak yang diharapkan dari kebijakan reklamasi pantai tersebut. Beberapa metode yang digunakan diatas digunakan peneliti untuk mengevaluasi dampak (*impact*) yang berfokus dampak sosial-ekonomi nelayan akibat pelaksanaan reklamasi pantai di Teluk Lampung.

D. Tinjauan terhadap Reklamasi Pantai

1. Pengertian Reklamasi Pantai

Salah satu upaya pemanfaatan dan penataan wilayah pesisir dengan diadakannya reklamasi pantai. Reklamasi pantai ini seringkali dijadikan solusi atau alternatif pemerintah untuk mengembangkan wilayah pesisir. Reklamasi pantai biasanya dilakukan oleh Negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin

menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi seperti itu maka banyak kota-kota yang melakukan reklamasi sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan lahan.

Menurut Maskur dalam (<http://ejournal.uwks.ac.id>) mengatakan bahwa kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.

Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal ini menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu. Pada Pasal 34 ini juga dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pengertian reklamasi lainnya menurut Wisnu Suharto dalam (<http://ejournal.uwks.ac.id/>), menyatakan bahwa reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan

pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya tidak terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai, mendefinisikan reklamasi adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan (*polder*), atau *drainase*. Metode urukan dilakukan dengan cara menguruk tanah timbunan berupa pasir yang diperoleh dari dasar laut dan darat atau berupatanah lempung, material sisa pembakaran batu bara, limbah padat, dan lainnya.

Pembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada berbagai pedoman dan Undang-Undang yang mengatur tentang reklamasi pantai, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
- b. Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.40/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial

ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan.

- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang merupakan *guide line* bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah serta syarat-syarat pengurusan izin mengadakan reklamasi pantai.
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 34 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamankan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor. 31A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.

2. Tujuan Reklamasi

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1990) dalam (<http://ejournal.uwks.ac.id/>), tujuan reklamasi yaitu untuk memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi

dan industri. Dilakukannya reklamasi ini sebenarnya merupakan suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan lahan yang semakin pesat namun semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut menjadikan reklamasi sebagai solusi terbaik ditengah pengembangan dan pembangunan daerah. Reklamasi sering kali diterapkan dinegara-negara maju atau kota-kota maju untuk lebih memanfaatkan wilayah pesisir untuk mendukung pembangunan dan nantinya akan berdampak pada pendapatan daerah.

3. Syarat-Syarat Pengadaan Reklamasi Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan, namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada disisi daratan;
- b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan.

Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut:

- a. Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mengatur mengenai kawasan reklamasi pantai;
- b. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
- c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian atau kelayakan properti (studi investasi);
- d. Sudah ada studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan maupun regional.

4. Dampak Reklamasi

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa dampak adalah perubahan lingkungan disebabkan oleh suatu kegiatan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa suatu usaha atau investasi dalam kegiatan pembangunan memiliki kemampuan potensial menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

a. Dampak Sosial-Ekonomi

Dalam Keputusan Pemerintah Nomor 14 Menteri Lingkungan Hidup Tahun 1994, tentang “Penetapan Dampak Penting” terhadap aspek sosial yaitu *pertama*, pranata sosial/lembaga-lembaga yang tumbuh dikalangan masyarakat, adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku; *kedua*, proses sosial (kerjasama, akomodasi konflik dikalangan masyarakat); *ketiga*, akulturasi, asimilasi dan integritas dari berbagai kelompok masyarakat; *keempat*, kelompok-kelompok dan organisasi sosial; *kelima*, pelapisan sosial

dikalangan masyarakat; *keenam*, perubahan sosial yang sedang berlangsung dikalangan masyarakat; *ketujuh*, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan pekerjaan. Sedangkan dampak terhadap aspek ekonomi, yaitu: *pertama*, kesempatan bekerja dan berusaha; *kedua*, pola perubahan dan penguasaan lahan dan sumber daya alam; *ketiga*, tingkat pendidikan; *keempat*, sarana dan prasarana infrastruktur; *kelima*, pola pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Lubis (1997) dalam (<http://repository.usu.ac.id>), menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis dampak lingkungan, dijelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Regional sebagai hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan RTUD dengan melibatkan kewenangan dari satu instansi. Konsep dan metodologi pembangunan diperlukan untuk menilai kelayakan lingkungan suatu rencana pembangunan skala besar yang umumnya terletak pada daerah rawan, kawasan banjir, pulau kecil, daerah aliran sungai (DAS), hutan lindung dan daerah resapan air. Kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) regional dapat memberikan informasi tentang kecenderungan perkembangan suatu wilayah, faktor pendorong, pembatasan serta dampak baik terhadap lingkungan fisik, maupun ekonomi sosial.

Berkenaan dengan kehidupan masyarakat pesisir pantai yang didominasi oleh masyarakat nelayan, Supriharyono (2000) dalam (<http://repository.usu.ac.id>),

mengemukakan bahwa permasalahan dibidang sosial ekonomi masyarakat nelayan meliputi tingkat pendapatan, aspek perumahan dan perilaku/etos kerja masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dewasa ini kecenderungan untuk memanfaatkan kawasan pesisir sebagai daerah pengembangan yang baru tampak semakin besar. Hal ini, karena daerah pesisir relatif datar, harga lahan yang masih rendah dan dapat dicapai darat dan laut, sehingga perubahan lingkungan pantai akibat kegiatan pembangunan akan berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung, menurut Supriyanto (2000) dalam (<http://repository.usu.ac.id>), mengatakan bahwa perubahan tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat yang berakibat pada menurunnya pendapatan mereka.

Menurut Lumain (2003) dalam (<http://repository.usu.ac.id>), mengatakan bahwa reklamasi memberikan dampak sosial ekonomi yang positif dan negatif masyarakat, diantaranya bahwa sebagian penduduk telah beralih pekerjaan dari nelayan menjadi buruh bangunan dan tukang. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan pendapatannya cenderung menurun setelah adanya reklamasi pantai, harga rumah penduduk lebih tinggi dari harga lahan sebelum reklamasi dan terjadi perubahan pemanfaatan lahan dari fungsi pemukiman ke fungsi lain seperti ruko dan lain-lain. Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak ini pun mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat sekitar.

b. Dampak positif

Secara umum dampak positif dari kegiatan reklamasi sesuai dengan tujuan diadakannya reklamasi ini, seperti menghidupkan kembali transportasi air, membuka peluang pembangunan wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari dan meningkatkan pendapatan daerah. Pada dasarnya kegiatan reklamasi juga didasarkan pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, dan penyerapan tenaga kerja. Reklamasi ini sendiri memberikan banyak keuntungan dalam mengembangkan wilayah, selain itu memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran wilayah, penataan daerah pantai, menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari. Pulau hasil reklamasi juga dapat menahan gelombang pasang yang mengikis pantai, selain itu juga dapat menjadi semacam bendungan untuk menahan banjir rob didaratan. Walaupun memang dampak positif dari kegiatan reklamasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dalam jangka waktu yang cukup lama, dan tidak secara instan atau langsung dapat memberikan manfaat yang besar terutama bagi pengembangan dan penataan daerah pesisir.

c. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri, reklamasi ini tidak sepenuhnya mendatangkan dampak yang positif saja namun perlu diingat bahwa reklamasi merupakan hasil campur tangan manusia terhadap alam, yang tentunya memungkinkan

semua kegiatan ini juga membawa dampak buruk. Dalam skripsinya Trimiarti (2016:60), adapun beberapa dampak negatif dari reklamasi pantai antara lain:

- 1) Akibat kurangnya pengendalian dampak negatif Lingkungan akan berimbas kepada kerusakan ekosistem yang ada di laut dari sebelumnya.
- 2) Pengembangan daerah akan berdampak pada arus transportasi di daerah akan meningkat, maka daerah utama dan daerah reklamasi harus diperhitungkan arus transportasi agar menghindari kemacetan karena tidak adanya integrasi dari daerah reklamasi dan daerah utama (daerah asli)
- 3) Adanya penyebaran daerah kumuh di sekitar wilayah reklamasi pantai.
- 4) System hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadi abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir karena genangan air yang banyak dan lama.

Selain itu adanya reklamasi juga akan membuat wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena dimanfaatkan untuk kegiatan privat. Selain itu keanekaragaman biota laut juga akan berkurang baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang ada. Disamping itu, reklamasi pantai juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat, yang sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencarian laut sebagai petani tambak, nelayan dan buruh, sehingga adanya reklamasi ini akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan atau penghasilan mereka.

Tidak hanya sebatas itu, untuk reklamasi biasanya memerlukan material urugan yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas, kerusakan jalan, penurunan kualitas udara, debu, dan suara bising yang akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sehingga untuk meminimalkan dampak fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi maka perlunya mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan reklamasi ini dan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasar pada pendoman yang ada dengan melibatkan *stakeholder*, mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Pada dasarnya, reklamasi harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan orientasi jangka panjang.

E. Kerangka Pikir

Kebijakan reklamasi pantai di wilayah Bandar Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, menyatakan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau *drainase*. Selain itu Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian berdasarkan

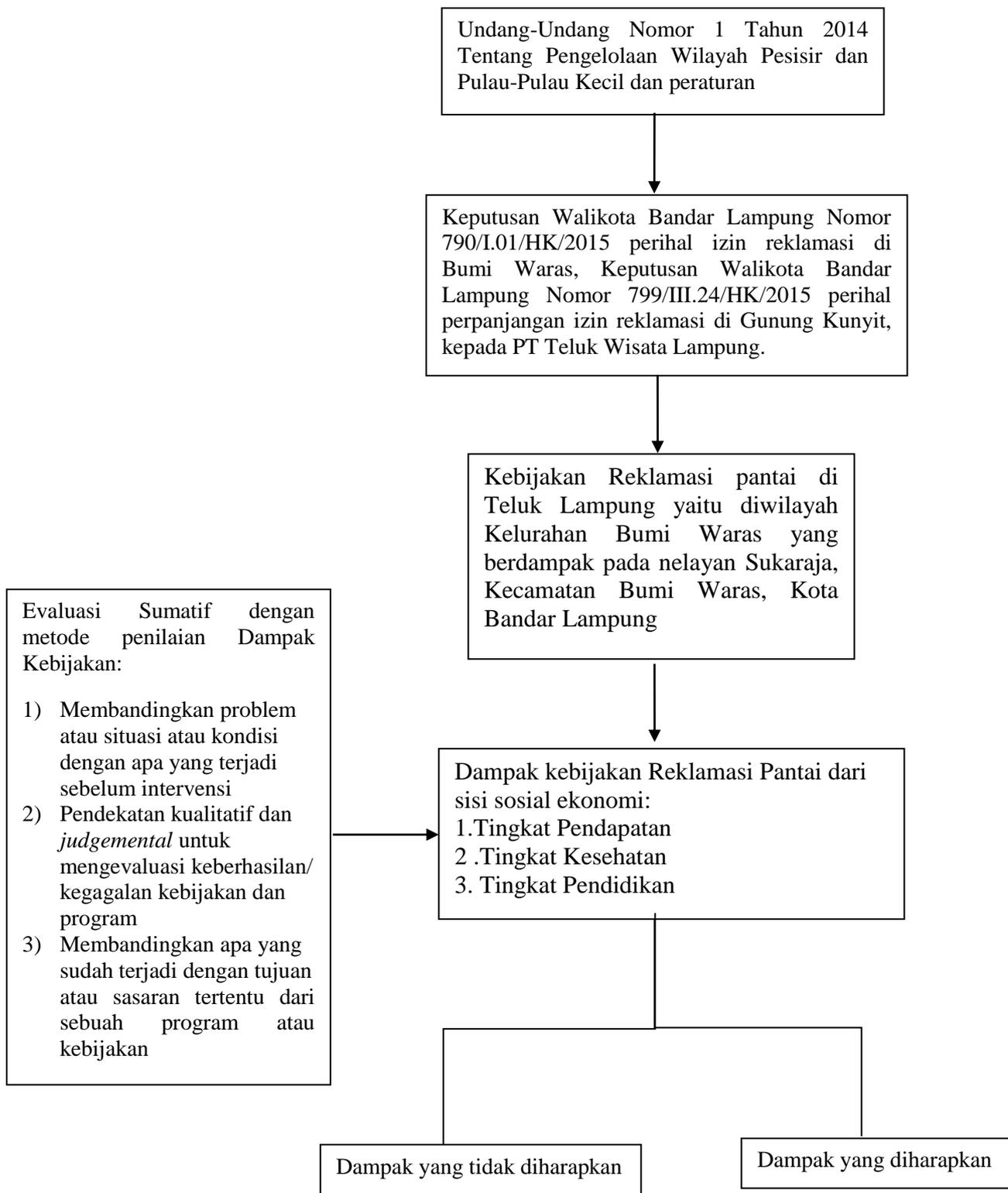
Perjanjian Kerjasama Nomor.002. Tahun 2010/012/TWL/PKS/06/2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.KP. 642 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Pekerjaan Reklamasi Pantai kepada PT. Teluk Wisata Lampung. Dan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 790/I.01/HK/2015 dan Nomor 799/III.24/HK/2015 perihal izin reklamasi kepada PT. Teluk Wisata Lampung yang berlokasi di Kelurahan Bumi Waras.

Kelurahan Bumi Waras ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukaraja, dalam hal ini di sekitar proyek reklamasi di wilayah Kelurahan Bumi Waras tidak ada warga yang bermukim disana, namun sebaliknya di Kelurahan Sukaraja cukup dekat dengan proyek reklamasi pantai merupakan lokasi padat penduduk dan banyak nelayan yang terkena dampak reklamasi pantai tersebut. Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan bahwa bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada dengan memanfaatkan lahan yang kurang potensial untuk ditata agar dapat menunjang dan memberi nilai lebih bagi pembangunan daerah. Di dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi tersebut terdapat beberapa permasalahan diantaranya yakni pada kenyataannya tidak adanya studi AMDAL kawasan maupun regional, sampah semakin menumpuk dipinggiran pantai, kerusakan lingkungan, air laut menjadi keruh dan mengganggu kelestarian ekosistem laut yang menyebabkan semakin sulitnya nelayan mencari tangkapan ikan, selain itu saluran *drainase* terganggu sehingga dapat menyebabkan banjir atau genangan pada saat hujan lebat bersamaan dengan pasang naik air laut.

Dampak sosial maupun ekonomi yang dirasakan masyarakat disekitar proyek reklamasi khususnya yang berprofesi sebagai nelayan yaitu nelayan kehilangan mata pencariannya bahkan banyak nelayan yang beralih profesi akibat menurunnya hasil tangkapan ikan yang mempengaruhi tingkat biaya pendidikan anak-anak nelayan tersebut.

Hasil dari reklamasi pantai di Teluk Lampung yang telah dilakukan oleh pihak swasta biasanya lahan reklamasi ini digunakan sebagai tempat industri, perdagangan, pemukiman, pergudangan maupun perluasan lahan pelabuhan. Dalam memantau hasil kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat : keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*).

Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sebaliknya dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut, maka dapat terlihat bagaimana dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat khususnya nelayan akibat dari adanya kebijakan reklamasi pantai tersebut baik dampak yang diharapkan maupun dampak tidak diharapkan.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sementara itu, menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian dilapangan berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, tabel foto, atau dokumen-dokumen. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah

penelitian yaitu mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Di Teluk Lampung yang difokuskan pada dampak sosial-ekonomi nelayan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007: 93-94), dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Fokus penelitian yang diambil peneliti yaitu mengenai dampak kebijakan reklamasi pantai dengan menekankan pada dampak sosial-ekonomi nelayan akibat adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung :

1. Dampak sosial-ekonomi :
 - a. Perubahan kondisi perekonomian nelayan sekitar proyek reklamasi pantai di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras(dari sisi daya beli dan taraf hidup nelayan)
 - b. Perubahan kondisi kesehatan para nelayan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras.
 - c. Perubahan kondisi pendidikan anak-anak nelayan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dari sisi jenjang atau taraf pendidikan yang ditempuh).

Untuk mengkaji dampak kebijakan reklamasi, maka peneliti menggunakan Evaluasi Sumatif dengan metode penilaian dampak menurut Rossi dan Freeman yang meliputi tiga aspek ini antara lain:

- 1) Membandingkan problem atau situasi atau kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- 2) Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program
- 3) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan

Ketiga penilaian atas dampak ini dipilih oleh peneliti dari tujuh variabel dalam metode penilaian dampak menurut Rossi dan Freeman, karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi sumatif dengan ketiga metode penilaian dampak, dianggap tepat digunakan untuk menggambarkan dan mengkaji dampak sosial-ekonomi nelayan setelah adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung ini.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi, Moleong (2007:128), menyatakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini

dipilih secara sengaja yaitu di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

Peneliti memilih lokasi di Kelurahan Sukaraja, mengingat dari hasil riset di Pemkot Bandar Lampung dan Kelurahan Sukaraja, dalam hal ini Kelurahan Sukaraja merupakan daerah yang dekat atau berbatasan langsung dengan proyek reklamasi yang ada di Kelurahan Bumi Waras, dan Kelurahan ini berada di tengah 2 (dua) lokasi (Kelurahan Bumi Waras dan Way Lunik) reklamasi yang sedang dalam pelaksanaan reklamasi pantai. Dalam hal ini, Kelurahan Bumi waras menjadi lokasi reklamasi cukup luas seluas 117 hektar di tahun 2010 dan izin diperpanjang kembali di tahun 2015 dengan luasan reklamasi 50 hektar, dan lokasi reklamasi ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukaraja.

Meski Kelurahan Sukaraja bukan merupakan lokasi proyek reklamasi pantai namun Kelurahan ini cukup padat penduduk dengan mayoritas berprofesi sebagai nelayan, jika dibandingkan dengan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Bumi Waras dan Way Lunik yang jumlahnya sedikit. Selain itu disekitar proyek reklamasi, tepatnya di Kelurahan Bumi Waras tidak terdapat nelayan atau masyarakat yang bermukim disekitar proyek reklamasi pantai tersebut. Maka dari itu, peneliti menentukan studi kasus di Kelurahan Bumi Waras terhadap nelayan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara yaitu Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan BPPLH Kota Bandara Lampung, LSM Walhi Lampung, Lurah Sukaraja, Nelayan di Kelurahan Sukaraja, serta warga setempat. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan dampak reklamasi pantai yang di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara ke instansi pemerintahan, dan lokasi Reklamasi pantai di Teluk Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang didapat peneliti berupa naskah, dokumen resmi, literature, artikel, koran

dan sebagainya yang terkait dengan dampak reklamasi pantai. Data sekunder yang digunakan peneliti antara lain:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030
- b. Profil Kelurahan Sukaraja
- c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomo 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 790/I. 01/HK/2015 perihal izin reklamasi di Bumi Waras, dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 799/III. 24/HK/2015 perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kuniyit, kepada PT Teluk Wisata Lampung.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2014:226), menyatakan bahwa observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2007:186), menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Reklamasi pantai di Teluk Lampung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini difokuskan terhadap dampak sosial-ekonomi nelayan di kelurahan Sukaraja. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Adapun jumlah informan yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data Informan

No	Informan/Instansi	Jabatan/Pekerjaan	Waktu wawancara
1	Chepi Hendri Saputra	Ketua Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (BAPPEDA)	10 November 2016
2	Dirmansyah	Kasubag Sekertariat BAPPEDA	9 November 2016
3	Nuryanti	Kepala Bidang Pesisir kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	17 November 2016
4	Galih Galih A Firman Arif	Pegawai bidang kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	26 Oktober 2016
5	Ahmad Barmawi	BPPLH Kota Bandar Lampung	18 November 2016
5	Hendra	Direktur LSM Walhi	25 Oktober 2016
6	Adi Surya	Lurah Sukaraja	27 Oktober 2016
7	Maryudi	Ketua Kelompok Nelayan Sukaraja	20 Oktober & 3 November 2016

8	Danal	Sekretari Kelompok nelayan Sukaraja	23 September 2016
9	Samani	Bendahara Kelompok Nelayan Sukaraja	18 Oktober 2016
10	Zainal	Ketua RT 11 Kelurahan Sukaraja dan sebagai nelayan	25 Oktober 2016
11	Harun	Warga Kelurahan Sukaraja yang berprofesi sebagai nelayan	25 Oktober 2016
12	Tia	Warga Kelurahan Sukaraja	25 Oktober 2016
13	Yanti	Warga Kelurahan Sukaraja	23 September 2016

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2016*

Berdasarkan tabel 2. diketahui bahwa informan yang diwawancarai untuk mengumpulkan data primer diantaranya Pemerintah Kota Bandar Lampung atau SKPD selaku pembuat kebijakan dan *implemator* dari kebijakan reklamasi pantai, LSM Walhi Lampung dipilih karena dianggap sebagai lembaga non-profit yang berfokus pada lingkungan hidup Indonesia. Sedangkan Lurah Sukaraja dan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dipilih karena dianggap mengetahui dan merasakan langsung dampak dari reklamasi pantai di Teluk Lampung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 231), Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang didapatkan di lokasi penelitian berupa tulisan dan gambar-gambar atau foto yang berkaitan dengan dampak reklamasi pantai yang ditemukan peneliti dilapangan. Dokumen dalam penelitian ini berguna untuk memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

F. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.

Menurut Moleong (2007:324), ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

a. Triangulasi

Menurut Moleong (2007: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.

Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti melakukannya dengan cara :

- a) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b) mengeceknya dengan berbagai sumber data
- c) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Bappeda Kota Bandar Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, LSM Walhi Lampung, Lurah Sukaraja dan nelayan yang berada di wilayah Kelurahan Sukaraja.

2. Keteralihan

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

3. Ketergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak

melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ} 20'$ sampai dengan $5^{\circ} 30'$ lintang selatan $105^{\circ} 28'$ sampai dengan $105^{\circ} 37'$ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian bagi masyarakat.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan sensus 2015), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/ km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. (Sumber: [http://bandarlampungkota.go.id/public/2015/10/RPJMD-Kota-Bandar-lampung .pdf](http://bandarlampungkota.go.id/public/2015/10/RPJMD-Kota-Bandar-lampung.pdf))

B. Perubahan Jumlah Kecamatan

Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan.

Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Lalu, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Adapun 7 kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari:

1. Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton.
2. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan.
3. Kecamatan Kemiling pemekaran dari Kecamatan Tanjung karang barat.
4. Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Kemiling.
5. Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
6. Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur.
7. Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Barat.
8. Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan.

(Sumber : <http://digilib.unila.ac.id/6323/14/BAB%20IV.pdf>)

C. Gambaran Umum Kecamatan Bumi Waras

Kecamatan Bumi Waras merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di dalam wilayah kerja Kota Bandar Lampung. Kecamatan Bumi Waras terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan antara lain :

- 1) Sukaraja
- 2) Bumi Waras
- 3) Garuntang
- 4) Bumi Raya
- 5) Kangkung

Kecamatan Bumi Waras merupakan wilayah pantai yang membujur dari Timur ke arah Barat Pantai Teluk Lampung, dengan luas wilayah 376,5 ha dengan jumlah penduduk 52.330 jiwa, dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Kedamaian.
- b. Sebelah Selatan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Panjang.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Topografi Kecamatan Bumi Waras terdiri dari daerah yang relatif datar, terutama bagian yang menyusuri pantai dan sebagian kecil mempunyai wilayah perbukitan atau bergelombang, terutama di bagian Utara wilayah Kecamatan Bumi Waras. Kecamatan Bumi Waras termasuk wilayah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2000 sampai dengan 3000 mm setiap tahun. Struktur tanah Kecamatan Bumi Waras berwarna merah kehitaman dan sedikit jenis podsolik serta latosol berkategori sedang.

(Sumber:[http://bandarlampungkota/kecamatan/ bumiwaras.go.id](http://bandarlampungkota/kecamatan/bumiwaras.go.id))

D. Lokasi Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras

Kelurahan Bumi Waras merupakan wilayah terluas di Kecamatan Bumi Waras, dengan luas wilayah 73 ha (16,24 persen dari luas total Kecamatan Bumi Waras) dengan jumlah penduduk 13.369 jiwa dengan 3.439 Kepala Keluarga (KK), dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Pecoh Raya.
- b. Sebelah Selatan dengan Teluk Lampung dan Kelurahan Kangkung.

- c. Sebelah Timur dengan Kelurahan Sukaraja.
- d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Kupang Raya.

Masyarakat disekitar kelurahan bumi waras mayoritas mendapatkan penghasilan atau berprofesi sebagai buruh. Keadaan wilayah kelurahan bumi waras terletak pada tepian Teluk Lampung dengan ketinggian permukaan laut 2 ½ m.

(Sumber: <http://bandarlampungkota/kecamatan/bumiwaras/kelurahan/bumiwaras.go.id>)



Gambar 2. Lokasi Reklamasi Pantai di Kelurahan Bumi Waras
 Sumber: Hasil Observasi tanggal 28 Mei 2016

E. Lokasi Nelayan Kelurahan Sukaraja

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sukaraja

Kelurahan Sukaraja adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Sebelum menjadi kelurahan, Sukaraja adalah sebuah kampung yang pada masa penjajahan juga dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, warga masyarakat Teluk betung adalah masyarakat Lampung yang berasal dari daerah Semangka, Kota Agung. Dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah pada setiap tahunnya, maka mereka sepakat untuk melakukan musyawarah bersama membahas pemimpin dan penamaan atas wilayah tersebut.

Nama Sukaraja ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama setelah penetapan Batin Rajo Ugokh sebagai Kepala Kampung yang pertama. Musyawarah tersebut belum diketahui secara pasti tahun terlaksananya, begitupula dengan tahun kepemimpinan Kepala Kampung Sukaraja yang pertama. Masyarakat Lampung pada masa itu juga telah berpikir demokrasi, yakni dengan memberikan kesempatan kepada warga dari suku lain untuk menjadi Kepala Kampung, hal ini terbukti dengan terpilihnya Kepala Kampung Sukaraja yang kedua yang berasal dari etnis Banten.

(Sumber: <http://digilib.unila.ac.id/5931/21/BAB%20IV.pdf>)

2. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Kelurahan Sukaraja terletak di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Kelurahan Sukaraja berada di dekat pusat keramaian dan

merupakan daerah lintasan yang menghubungkan daerah Teluk Betung dengan Panjang. Kelurahan Sukaraja juga merupakan salah satu kelurahan yang berhimpitan langsung dengan Teluk Lampung. Luas masing-masing bentangan wilayah di Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Luas Bentangan Wilayah Kelurahan Sukaraja

No	Bentangan Wilayah	Luas
1	Wilayah Kawasan Permukiman	69,3 ha
2	Wilayah Kawasan Pemakaman Umum	2,4 ha
3	Wilayah Kawasan Perkantoran Swasta	5,7 ha
4	Wilayah Kawasan Pertokoan dan Lainnya	2,9 ha
	Total Keseluruhan	80,3 ha

Sumber: Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2013

Wilayah Kelurahan Sukaraja dapat dikatakan padat, sepanjang jalan di kelurahan ini berdiri bangunan-bangunan cukup besar berupa perkantoran, pabrik, gudang, pertokoan maupun fasilitas umum lainnya. Bila masuk ke dalam (jalan kecil) maka akan tampak permukiman warga yang sangat padat dan berhimpitan. Seperti yang telah ditunjukkan pada Tabel 3. bahwa luas wilayah Kelurahan Sukaraja adalah 80,3 hektar. Berdasarkan hasil observasi di lokasi, tidak ditemukan lahan yang kosong. Semua lahan digunakan dengan maksimal, permukiman warga pun begitu padat dan saling berhimpitan satu sama lain.

b. Batas Wilayah

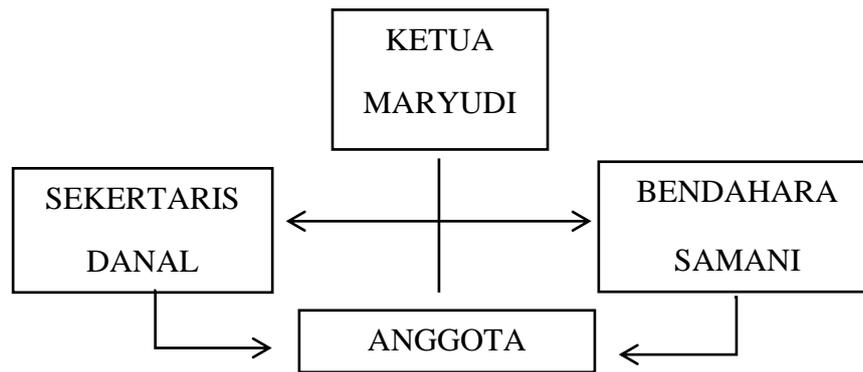
Wilayah kelurahan ini terletak pada tepian Teluk Lampung dengan ketinggian dari permukaan laut 2,5 meter. Batas-batas wilayah Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Garuntang (Kecamatan Bumi Waras).
- 2) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Pantai Teluk Lampung (Kecamatan Bumi Waras).
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Way Lunik (Kecamatan Panjang).
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bumi Waras (Kecamatan Bumi Waras)

(Sumber: <http://digilib.unila.ac.id/5931/21/BAB%20IV.pdf>)

3. Perikanan

Kelurahan Sukaraja yang berada pada lintasan garis pantai Teluk Lampung memunculkan pekerjaan sebagai nelayan, yaitu memanfaatkan sumberdaya kelautan untuk memperoleh pendapatan rumahtangganya. Terdapat 81 rumah tangga yang menekuni pekerjaan ini dan membentuk sebuah kelompok yang bernama kelompok nelayan Sukaraja dengan kepengurusannya yang dijelaskan pada Gambar 3. Kelompok ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial antara satu dengan lainnya yang terlibat dalam kegiatan sebagai nelayan. Selain itu, mereka juga mengupayakan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggalnya dengan kebersihan.



Gambar 3. Bagan struktur kelompok nelayan Kelurahan Sukaraja Tahun 2014
 Sumber: <http://digilib.unila.ac.id/5931/21/BAB%20IV.pdf>

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2008 dan sampai saat ini diketuai oleh Bapak Maryudi. Kelompok ini mengadakan pertemuan setiap 6 bulan sekali dan membahas kegiatan gotong-royong yang diadakan setiap hari Jumat. Hubungan sosial dalam kelompok ini tercipta dengan sangat baik, hal ini terlihat dari kekompakan mereka saat sedang melaut, menarik payang, dan juga gotong-royong menjaga kebersihan lingkungannya.

Kekompakan dari masyarakat Sukaraja yang begitu baik juga menghasilkan tangkapan ikan yang cukup besar dalam usaha memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan. Sistem bagi hasil merupakan cara yang dilakukan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan yang diperoleh masing-masing nelayan (hasil tangkapan satu kapal dibagi 10 orang). Setelah itu, masing-masing nelayan yang telah memperoleh bagiannya mempunyai hak untuk mengolah sendiri maupun dipasarkan. Untuk sekali melaut, dibutuhkan waktu tiga jam dengan jarak 600 meter dari daratan. Jarak ini masih cukup dekat dengan daratan sehingga ikan hasil tangkapan yang diperoleh belum

maksimal dibandingkan mereka yang melaut pada jarak yang lebih jauh dari daratan.

Tabel 4. Jenis Ikan hasil Tangkapan Nelayan Sukaraja

No	Jenis Ikan	Hasil Tangkapan
1	Tongkol/Cakalang	500 kg/Tahun
2	Cumi	21.900 kg/Tahun
3	Kembung	73.000 kg/Tahun
4	Selar	164.250 kg/Tahun

Sumber: *Monografi Kelurahan Sukaraja, Tahun 2013*

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa terdapat empat jenis ikan tangkapan nelayan yang sangat diminati dipasaran. Hasil perikanan yang diperoleh langsung oleh para nelayan ini dijual secara langsung kepada konsumen. Adapun hasil tangkap yang memiliki nilai jual tinggi di Kelurahan Sukaraja ini adalah cumi-cumi yang dijual dengan harga Rp 50.000,00/kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual ikan kembung yang berharga Rp 25.000,00/kg maupun ikan selar. Sementara itu, jenis ikan tongkol/cakalang merupakan jenis ikan yang musimnya setiap satu tahun tahun sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua nelayan Kelurahan Sukaraja, yaitu Bapak Maryudi diketahui bahwa ikan tongkol/cakalang ini hanya muncul dalam waktu satu minggu saja selama satu tahun, sehingga jenis ikan ini tidak diperoleh secara rutin setiap harinya seperti ikan kembung, ikan selar maupun cumi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung, dapat disimpulkan:

a. **Kondisi Pra dan Pasca Intervensi Kebijakan Reklamasi**

Terjadi perubahan kondisi perekonomian nelayan yang diakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan.

b. **Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Reklamasi Pantai**

Manfaat sosial ekonomi belum diterima masyarakat pesisir dan kebijakan ini belum berhasil mengatasi permasalahan kurangnya lahan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, karena proses pelaksanaan reklamasi pantai ini belum sepenuhnya selesai dan masih dihentikan sementara waktu.

c. **Tujuan atau sasaran Kebijakan Reklamasi Pantai**

Tujuan reklamasi pantai untuk membenahi atau menata kawasan pesisir Teluk Lampung belum tercapai karena kebijakan reklamasi ini juga belum dapat

menyelesaikan permasalahan penataan pemukiman kumuh dan menjadikan kawasan pesisir memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

2. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung juga menghasilkan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), yaitu:

- a. Perubahan kondisi laut yang semakin sempit dan rusaknya ekosistem laut menyebabkan nelayan menjadi kesulitan mencari ikan dan menyebabkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan menjadi menurun.
- b. Perubahan kondisi perekonomian nelayan yang menurun secara langsung juga mempengaruhi kondisi pendidikan anak nelayan. Pendapatan nelayan dari hasil tangkapan yang menurun, membuat nelayan menjadi tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.
- c. Kebijakan reklamasi pantai juga menyebabkan dampak yang mengganggu kesehatan, seperti debu, kebisingan, menumpuknya sampah dipinggir pantai, air menjadi keruh dan banjir yang menimbulkan penyakit diantaranya, gatal, demam, muntaber dan lain-lain. Selain akibat menurunnya pendapatan nelayan juga berpengaruh pada pemenuhan gizi dari keluarga nelayan itu yang tidak tercukupi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya partisipasi masyarakat dalam kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Dibutuhkannya koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak pengembang untuk menangani dampak negatif yang muncul dari adanya kebijakan ini dan pengawasan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam proses pelaksanaan proyek reklamasi pantai.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu untuk mulai menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya laut.
4. Perlunya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan atas kerugian yang diterima.
5. Jika kebijakan ini tetap dilanjutkan maka pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola hasil laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Dunn, William N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy,M. Irfan. 1986. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bina Angkasa.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik(Konsep,aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. cv Mandar Maju.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rukman, Ali dkk, 2016. *Tinjauan Kritis Reklamasi Teluk Lampung*. Bandar Lampung: Pustaka Labrak
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: teori, proses dan studi kasus*, Jakarta: PT Buku Seru.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

SKRIPSI dan JURNAL

Choirul Huda, Moch. 2013. *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei. dalam <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201308321915161512/1.pdf>, diakses tanggal 28 mei 2016

Ratna Sari, Octavia. 2015. *Evaluasi Dampak Program KB bagi Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS-1) di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Syurahman Toha, Muhammad. 2014. *Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Bandar Lampung Tahun 2012 (Studi Kasus di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Trimiartim, Yose. 2016. *Status Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Wulandari. 2013. *Dampak Pembangunan Jalan Tol Kanci-Pejagan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*. Proposal Penelitian. Fakultas Ekologi manusia. Institut Pertanian Bogor. dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31418/4/chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 29 mei 2016

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

SUMBER LAINNYA

<http://lampost.co/berita/cemar-di-teluk-lampung>, diakses tanggal 28 Mei 2016

<http://m.republika.c.id/berita/nasional/daerah/16/04/24/o65a2t280-walhi-tolak-reklamasi-teluk-lampung>, diakses tanggal 28 Mei 2016

<http://lampung.tribunnews.com/2016/04/10/reklamasi-pantai-di-bandar-lampung-berpotensi-rusak-terumbu-karang>, diakses tanggal 28 Mei 2016

<http://rmol.co/read/2016/07/20/253751/Kejagung-Kirim-Tim-Usut-Reklamasi-Teluk-Lampung>, diakses tanggal 11 Agustus 2016.

<http://bandarlampungkota.kecamatan/bumiwaras.go.id>, diakses tanggal 28 September 2016

<http://bandarlampungkota.kecamatan/bumiwaras/kelurahan/bumiwaras.go.id>, diakses tanggal 28 September 2016

<http://digilib.unila.ac.id/5931/21/BAB%20IV.pdf>, diakses tanggal 28 September 2016

<http://bandarlampungkota.go.id/public/2015/10/RPJMD-Kota-Bandar-lampung.pdf>, diakses tanggal 28 September 2016